

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Cut Sah Kha Mei Zsazsa

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Email: cutsasa22@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini diambil dari latarbelakang masalah yaitu masih rendahnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Naga Timbul. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki penghasilan mencukupi kebutuhannya, masyarakat cenderung mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak menjalankan dengan baik serta minat masyarakat rendah, hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa belum optimal dimanfaatkan, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim. Rendahnya pemberdayaan masyarakat mempengaruhi pembangunan desa, untuk itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hambatan yang dihadapi, terdapat dua faktor yaitu faktor internal, mencakup dana yang di butuhkan untuk melakukan kegiatan tidak kunjung turun oleh Pemerintah Desa, perangkat desa yang masih kurang melakukan kegiatan pemberdayaan, dan faktor eksternal yaitu masyarakatnya kurang minat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena faktor usia dan jarak ke kantor Desa. Adapun pembangunan desa yang belum dilakukan menyeluruh akibat adanya isu penyimpangan dana oleh Pemerintah Desa, sehingga pembangunan desa tertinggal dan belum termaksud desa maju serta kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK baik dibidang pertanian dan perdagangan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Pembangunan Desa.

COMMUNITY EMPOWERMENT IN DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF NAGA ARISING IN TANJUNG MORAWA SUB-DISTRICT DELI SERDANG DISTRICT

ABSTRACT. This research was taken from the background of the problem, namely the low implementation of community empowerment in development carried out by the Naga Timbul Village Government. This can be seen from the fact that there are still people who do not have enough income to meet their needs, people tend to rely on assistance provided by the government, but the government does not run it well and people's interest is low, this happens because the management of natural resources and human resources in the village is not optimal utilized, the knowledge possessed by the community is still minimal. Low community empowerment affects village development, for this reason it is necessary to increase community empowerment by the Village Government. The research method used was descriptive qualitative with a total of 5 informants. The data collection techniques used library research, observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of community empowerment in development in Naga Timbul Village did not go well. This can be seen from the obstacles encountered, there are two factors, namely internal factors, including the funds needed to carry out activities that have not been disbursed by the Village Government, village officials who are still lacking in empowerment activities, and external factors, namely the community is less interested in participating in activities carried out by the Village Government, due to age and distance to the Village office. As for village development that has not been carried out in its entirety due to the issue of funds diversion by the Village Government, so that the development of villages is left behind and not yet referred to as advanced villages and empowerment activities are prioritized for physical empowerment such as road construction, while non-physical empowerment is related to official training for the village government and PKK both in agriculture and trade has not run as it should.

Key Words: Empowerment, Community, Village Development.

PENDAHULUAN

Asumsi dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul masih dikategorikan rendah, hal ini dilihat dari pemerintah desa maupun masyarakat yang kurang antusias dalam kegiatan pemberdayaan, padahal sumber daya alam yang ada mendukung, namun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Desa.

Hasil riset terdahulu oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tetelesi Sorowi masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan desa, sehingga yang membedakan dengan penelitian saya adalah tidak fokus ke pengelolaan dana lebih membahas pemberdayaan desa.

Hasil riset terdahulu oleh Nena Nurhasanah tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, yaitu mengatakan bahwa masih kurang maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan dikarenakan dalam segi kesiapan Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan, seperti belum terealisasinya kegiatan pembinaan dan pelatihan dengan baik. Sehingga yang membedakan dengan penelitian saya adalah pemberdayaan desa dalam pembangunan bukan hanya kurang di Pemerintah Desa melainkan masyarakat desa menjadi faktor hambatan pelaksanaan pemberdayaan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ke tiga paragraf 1 Pasal 126 tentang pemberdayaan masyarakat:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan Masyarakat khususnya bagi masyarakat desa sangat perlu dilakukan, hal ini dikarenakan meningkat atau menurunnya kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat mampu untuk mengatur hidupnya sendiri dan memiliki daya guna bagi keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan pengamatan awal diketahui masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Tidak mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan SDM di desa Naga Timbul dengan optimal.
2. Dana Desa seperti Bumdes tidak berjalan dengan baik karena ada isu penyimpangan dana Desa.
3. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam menerima segala materi pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan kurang berjalannya proses pemberdayaan yang dilakukan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat baik dibidang pertanian maupun perdagangan, dan masih ada usaha kecil yang menggunakan peralatan tradisional untuk melakukan produksinya serta dengan modal sendiri.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya

disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya pembangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Penulis tertarik menganalisis judul penelitian ini karena adanya masalah yang timbul di penjangjangan awal yaitu kurangnya minat masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengelola pemberdayaan masyarakat untuk memajukan pembangunan Desa.

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Theresia, 2015:119). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri (Theresia, 2015:123) .

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan adalah sebagai berikut: perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Sedangkan upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2015:114) adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

Pembangunan mencakup banyak makna, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, baik proses maupun tujuannya, baik duniawi dan rohaniah. Pada istilah pembangunan melekat pula pengertian ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan (Theresia, 2015:1).

Duadji (2014:6) berpendapat secara sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik dengan pertimbangan nilai atau orientasi nilai yang menguntungkan. Sedangkan menurut Listyaningsih (2014:24) mengatakan pembangunan adalah proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Tujuan pembangunan untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat, guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera (Sjafrizal, 2014:24).

Theresia dkk, 2015:200 mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk mengerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sjafrizal (2014:30-32) perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing salah satunya yang digunakan pada umumnya menurut jangka waktunya perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Jangka Panjang

Saat ini pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup 20 tahun. Rencana jangka panjang biasanya disebut perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum bersifat makro (menyeluruh) dan tidak sampai pada program dan kegiatan secara rinci.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun daerah. Perencanaan jangka menengah merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga sering dinamakan sebagai rencana tahunan yang merupakan jabaran dari rencana jangka menengah yang bersifat sangat operasional didalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaan.

METODE

Menurut Silalahi (2012) jenis penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif dan perspektif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu: pertama karena Desa Naga Timbul merupakan desa terpencil dan belum maju. kedua di Desa Naga Timbul merupakan desa yang sangat banyak penduduk belum berkecukupan dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai. Ketiga di Desa Naga Timbul SDA belum dimanfaatkan optimal.

Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa, lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Kemudian sejumlah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara langsung serta data yang diambil dari kepustakaan juga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dari faktor masyarakatnya masih rendah, dan masyarakat tidak antusias serta kurang minat dalam berusaha mandiri, hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi pemberdayaan yang tidak dihadiri masyarakat, alasannya karena factor usia dan jarak rumah ke kantor Desa jauh. Sedangkan dari faktor Pemerintah Desa dan perangkat Desa masih rendah belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara optimal, hal ini dilihat dari ketidakpedulian Kades serta adanya pengelolaan dana yang menyimpang.

Sehingga terlihat jelas model pemberdayaan masyarakat di Desa Naga Timbul pasif, sumber daya alam yang ada tidak dikelola dengan baik karena Pemerintah Desa tidak optimal mengeluarkan dana untuk PKK.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, harus bisa memperhatikan upaya pokok pemberdayaan masyarakat yang di kemukakan oleh Mardikanto (2015: 114) ialah sebagai berikut:

1. Bina manusia

Berdasarkan penelitian pelaksanaan bina manusia yang dilakukan oleh pemerintah bahwa pemanfaatan SDM di Desa Naga Timbul belum optimal karena masih sangat minim pengetahuan masyarakat dan rendahnya minat masyarakat dalam upaya pemberdayaan.

2. Bina usaha

Berdasarkan hasil penelitian bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum begitu maksimal karena dana tidak diturunkan secara menyeluruh, masih kurangnya pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan jejaring kemitraan sebagai jembatan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat. Serta usaha baik dibidang pertanian dan perdagangan 70% menggunakan biaya sendiri.

3. Bina lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan terkait SDA di Desa Naga Timbul sangat ada namun tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan optimal, adapun kegiatan usaha itu sudah cukup terlaksana seperti P2KP bantuan usaha kambing namun berhenti seketika. Hal ini karena kurang pedulinya Pemerintah Desa.

4. Bina kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bina kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Naga Timbul belum cukup baik atau masih rendah, dikatakan demikian karena keberadaan BUMDes belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, serta tidak sesuai dengan RAP hanya teori tidak ada praktek nyata yang optimal.

Sedangkan hasil penelitian terkait pembangunan desa dilihat sebagai berikut:

a. Pembangunan Dalam Bentuk Fisik

1) Pembangunan Sektor Infrastruktur Jalan Raya.

Salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang

menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang. Di Desa Naga Timbul pembangunan jalan sudah ada dan bertahap untuk merata.

2) Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan ke pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Di Desa Naga Timbul pembangunan jalan yang biasanya digunakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa mayoritas petani seperti padi, perkebunan sawit, sayur-sayuran. Namun pembangunan perairan bertani sudah ada.

3) Pembangunan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, mencuci dan lain-lain sangat membutuhkan air bersih. Di Desa Naga Timbul pembangunan air bersih sudah cukup baik.

b. Pembangunan Dalam Bentuk Non Fisik

1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengelolaan dana desa. Di Desa Naga Timbul sudah menjalankan dan mengikuti

Bimtek untuk pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Di Desa Naga Timbul masih kurang aktifnya ibu-ibu PKK dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Hambatan-Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Naga Timbul Yang Dihadapi Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya minat dan antusias masyarakat.
2. Masih kurangnya kepedulian Kades terhadap masyarakat secara merata.
3. Masih kurangnya kegiatan sosialisasi pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian baik berupa pengetahuan di bidang pertanian dan perdagangan.
4. Masih kurangnya pengembangan jejaring dan kemitraan usaha.
5. Sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat desa belum didapatkan secara merata.

6. Masyarakat dan pemerintah desa belum memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara tepat dan efektif.
7. Dana desa seperti BUMDes belum dimanfaatkan dan berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu minat dan antusias rendah, masih kurangnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok, belum maksimalnya pengembangan jejaring dan kemitraan, dan BUMDes tidak dimanfaatkan dengan optimal.

Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang Yang Dihadapi Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa oleh Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus meningkatkan minat dalam pemberdayaan karena ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sendiri.
2. Kades harus lebih aktif dan peduli kepada masyarakat dengan menjalin hubungan yang baik.

3. Pemerintah Desa melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan pengembangan kapasitas individu dengan cara yang tepat seperti mengadakan sosialisasi, pengajian dan musyawarah maupun pelatihan untuk pengembangan kualitas mutu diri dan pengetahuan sumber daya manusia secara terus menerus dan berkelanjutan.
4. Pemerintah desa melakukan pelatihan kepada Perangkat Desa agar memiliki kemampuan dalam membangun jejaring kemitraan yang memang sangat dibutuhkan.
5. Meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah atau agar bisa bekerja sama dalam memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.
6. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan optimal dan masyarakat harus lebih aktif dan kreatif terhadap pengelolaan hasil alam seperti dibidang pertanian.
7. Untuk BUMDes Pemerintah Desa harus melakukan pengaturan ulang pegawai di dalamnya agar menghindari penyelewengan yang sebelumnya pernah terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Naga Timbul adalah dengan melakukan berbagai perencanaan dan perbaikan untuk kedepannya agar optimal, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya guna.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dari faktor masyarakatnya masih rendah, dan masyarakat tidak antusias serta kurang minat dalam berusaha mandiri.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dari faktor Pemerintah Desa masih rendah belum optimal, hal ini dilihat dari ketidakpedulian Kades serta adanya pengelolaan dana yang menyimpang.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut:

- 1) Untuk masyarakat diharapkan harus lebih aktif, peduli dan antusias dalam pemberdayaan dan pembangunan desa karena ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri untuk kemajuan desa.
- 2) Untuk Pemerintah Desa diharapkan Perangkat Desa memiliki kemampuan dalam setiap bidang kegiatan pemberdayaan, hal itu penting dilakukan sebagai suatu dasar pengetahuan yang mesti dimiliki untuk melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, mengembangkan jejaring kemitraan usaha. dan menambah sarana dan

prasarana pendukung perekonomian masyarakat serta tidak melakukan penyimpangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Duadji, Noverman. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Unpar Pers.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Theresia, Aprillia, Krisnha S. Andini, Prima
G.P. Nugraha, dan Totok
Mardikanto. (2015). *Pembangunan
Berbasis Masyarakat*. Bandung: CV
Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).